

**BAB V**  
**PERAN SOSIAL POLITIK PEREMPUAN DALAM**  
**KONSEP SOSIAL BUDAYA**

**1. Peran Sosial Perempuan**

Semua orang memiliki peran-peran tersendiri di tengah masyarakatnya. Di antara peran tersebut, termasuk peran berdasarkan jenis kelamin. Sejak seorang anak dilahirkan, lingkungan telah mulai mempersiapkan seorang anak untuk berperilaku yang dianggap lingkungan sesuai bagi perempuan dan laki-laki.

Pola perilaku yang dianggap cocok untuk masing-masing jenis kelamin berdasarkan harapan masyarakat diistilahkan sebagai peran jenis kelamin sebagai :

*“Patterns of behavior for members of the two sexes approved and axxed by the social group with wich the individual is identified”.*

Menurut Donaldson dan Gullahorn yang dikutip oleh Meutia Naully (2003) bahwa : peran jenis kelamin melibatkan kepercayaan budaya tentang perilaku yang berbeda dan karakteristik dari orang yang diasosiasikan merupakan anggota dari tiap jenis kelamin.

Menurut Corsini (1987) menyatakan bahwa peran jenis kelamin merupakan sekumpulan atribut, sikap, trait kepribadian dan perilaku yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin.

Rawena (1983) menyatakan peran jenis kelamin sebagai pola perilaku yang merupakan karakteristik atau yang diharapkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi seseorang itu sebagai pria atau wanita.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran jenis kelamin merupakan serangkaian atribut kepribadian yang meliputi sikap dan juga pola perilaku yang dianggap sesuai untuk pria dan perempuan, dikaitkan dengan ciri-ciri feminin dan maskulin sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat berdasarkan budaya.

Seorang perempuan setelah menikah dimasukkan ke dalam unit keluarga suami dan anak-anaknya diakui sebagai milik keluarga suaminya. Hal ini konsekuensi sistem garis keturunan patrilineal pada masyarakat Mandailing.

Ayah merupakan kepala keluarga, sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di dalam keluarga. Pada masyarakat Mandailing maka laki-laki yang membentuk kelompok kekerabatan, memiliki hak bicara dan memutuskan dalam permasalahan adat. Ritual adat istiadat terpusat pada garis keturunan patrilineal dan hubungan antara laki-laki, pada hal perempuan dan konsep feminin dalam keseluruhan sistem. Perempuan berperan sebagai orang yang dipimpin dan dalam hubungan kekerabatan, perempuan berperan dalam menciptakan hubungan perbesanan.

Seorang ayah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki secara berbeda, anak laki-laki memang dituntut untuk kelask meneruskan dan memimpin keluarga, sedangkan anak perempuan nantinya akan meninggalkan keluarga.

Pengantin perempuan yang menikah dengan laki-laki dari kelompok keluarga yang berbeda merupakan simbol perwakilan dari keluarga ayahnya.

Cara pandang yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada tempatnya masing-masing dalam hubungan kekerabatan merupakan cara yang ampuh bagi dipertahankannya patrilineal selakigus patriarki dengan mengorbankan perempuan melalui pembatasan terhadap harta milik. Gender dalam hubungan kekerabatan dan hubungan sosial berkaitan dengan pembatasan perempuan terhadap harta milik. Bila jenis kelamin mengacu pada kategori biologis, maka konsep gender mengacu pada konsep sosial yang menempatkan seseorang sebagai maskulin atau feminim berdasarkan karakteristik psikologis.(Sulistyowati Irianto (2003). Maka kodrat yang seharusnya mengacu kepada perbedaan perempuan dan laki-laki sebatas reproduksiya, diperluas menjadi peranan dan kedudukan di berbagai bidang kehidupan.

## **2. Politik Dalam Perspektif Perempuan**

Kalau kita menyimak situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini, tidak salah apabila orang memberi label bahwa politik ini kotor. Demi politik, seolah-olah segala sesuatu dihalalkan. Bohong, tidak manusiawi, tidak adil, bahkan perampasan hak asasi manusia, dianggap hal yang wajar. Anehnya, yang melakukan semua itu adalah orang-orang pintar, bahkan orang-orang yang terhormat.

Melihat situasi politik seperti itu, orang bisa salah paham memahami arti politik. Bahkan mungkin, orang menjadi takut untuk berpolitik. Pada hal makin banyak orang takut berpolitik, maka para politikus ulung akan makin menjadi-jadi dalam mengecoh masyarakat. Perempuan yang dikonstruksi lemah, takut terhadap kejadian yang kasar, keras, dan mengerikan akan menjadi semakin takut berpolitik. Pada hal, keputusan politik sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan sampai ke hal-hal paling kecil dan persoalan-persoalan tersembunyi mengenai kaum perempuan.

Perempuan sebagai manusia, seperti halnya laki-laki, belajar tentang kehidupan melalui pengalaman hidupnya. Tetapi, kenyataan biologis telah membedakan pengalamannya. Pengalaman perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui memberikan pelajaran bagi perempuan bagaimana memelihara kehidupan, baik bagi dia sendiri maupun anak yang dilahirkannya. Secara alamiah, perempuan berusaha memelihara kehidupan dengan belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman kaumnya.

Menurut akal sehat yang adil, sudah sepantasnya apabila perempuan bebas menentukan apa yang akan dilakukan di dalam melaksanakan tugas manajemen kehidupan ini. Tetapi dalam realitas kehidupan, sudah berabad-abad lamanya perempuan tidak lagi mempunyai hak untuk mengatur kehidupan. Segala aspek kehidupan ditentukan oleh suatu kekuatan di luar kehidupan perempuan.

Apabila kita telusuri, kemudian kita analisis pengalaman yang satu ke pengalaman yang lain sangat jelas bahwa semua kejadian dalam kehidupan

masyarakat adalah hasil dari keputusan politik. Pertanyaan refleksi berlanjut, siapa pengambil keputusan? Mengapa mereka mempunyai wewenang (kuasa) menggunakan hak itu?

Untuk mengetahui siapa pengambil keputusan itu, sangat penting karena hasil keputusan merupakan hasil dari kerangka berpikirnya, kepeduliannya atau *interest*-nya. Menurut teori, pengambilan keputusan tertinggi tentang kehidupan masyarakat di Indonesia adalah MPR yang dipilih oleh rakyat. Tetapi, kenyataannya sangat berbeda dengan teori yang tampaknya sangat adil.

Apabila ditelesuri lebih lanjut, keputusan politik ada pada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bertentangan dengan rakyat banyak. Kelompok ini dapat kita sebut sebagai kelompok yang ingin menguasai kehidupan, tanpa mengingat bahwa kehidupan bukanlah milik mereka sendiri.

Menurut Nunuk P. Murniati (2004) bahwa : Bila kita gunakan pengertian politik adalah usaha untuk mengatur kehidupan, maka kita dapat pelajari bagaimana manusia purba mengatur kehidupannya. Konon saat itu, manusia bebas menentukan kehidupan sesuai dengan pengalaman hidupnya. Perempuan yang secara biologis hamil, melahirkan, dan menyusui tinggal di tempat aman untuk memelihara kehidupannya. Kaum laki-laki yang biologisnya lebih bebas dibanding keadaan biologis perempuan, pergi berburu dan menangkap hewan.

Dari pendapat diatas bahwa manusia bebas mengatur kehidupannya sesuai dengan keadaan lingkungan hidupnya. Namun sifat manusia berbeda dengan binata, yang sampai hari ini pun tetap hidup secara alamiah, manusia

mengembangkan alamiah dengan akal budinya. Proses ini kemudian dinamai budaya sebagai hasil kreasi daya pikir manusia. Dalam mewujudkan daya pikir ini, diikuti oleh permenungan-permenungan yang hasilnya kita kenal sebagai filosofi atau filsafat kehidupan. Dari filsafat ini, lahirlah berbagai cara pandang termasuk cara memadang kehidupan. Sayangnya, dalam proses manusia berbudaya, terjadi perampasan hak perempuan dalam menentukan kehidupan.

Budaya patriarki telah menyikirkan perempuan dari penentuan kehidupan. Patriarki yang berarti kekuasaan bapak, semula hanya berlaku dalam keluarga. Tetapi setelah cara berpikir patriarkh ini mengakumulasi, terciptalah cara berpikir pasangan (biner) dan dikotomis yang memposisikan si kuat (kuasa) menentukan kehidupan si lemah. Cara berpikir ini merasuk ke dalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah, kodrat. Di segala aspek kehidupan dalam masyarakat ini, diberlakukan pandangan biner patriarkh yang dikotomis. Pandangan ini antara lain mempertentangkan perempuan dan laki-laki yang berakibat pada penentuan posisi perempuan dalam kehidupan.

#### **a. Politik Bagi Perempuan**

Melalui politik, perempuan disingkirkan dari kehidupan. Kriteria manusia normal dibuat dari sudut pandang laki-laki. Oleh karena itu, patut direnungkan temuan yang dikemukakan Elizabeth Cady Stanton yaitu : (1) Kitab suci bukanlah kitan yang netral, melainkan merupakan senjata politik untuk melawan pembebasan perempuan, (2) Kitab suci telah melahirkan ajaran laki-

laki tentang kehidupan dan tentang Allah dari sudut pandang laki-laki. Pada hal mereka sendiri belum melihat dan bicara kepada Allah.

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kitab suci sebagai benda keramat yang tabu untuk pertanyakan. Namun, justru melalui cara mempolitisasi agama inilah, kaum perempuan diperbodoh. Disinilah perlunya kesadaran perempuan untuk mempertanyakan sejarah kitab suci, agama atau kepercayaan apa pun. Iman itu hidup dan bukannya mati.

Cara berpikir biner patriarkhi menghasilkan cara pandang tentang kehidupan dalam segala aspek. Pandangan berpasangan ini mempengaruhi Aristoteles dalam memahami politik. Pandang ini dinyatakan sebagai pandangan politik klasik, membuat dikotomi antara urusan bersama (kepentingan publik) dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Pandangan dikotomis pada perkembangannya, seperti dinyatakan oleh Samuel P. Huntington yaitu kepentingan publik secara singkat dikatakan sebagai kepentingan pemerintah, karena lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Namun pandangan politik klasik ini sangat kabur, sehingga pengertian politik diperjelas dengan melembagakan politik.

Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara berhasil memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dan dalam wilayah tertentu. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa kemudian masyarakat menganggap negara adalah penguasa. Walaupun pengertian politik

dikembangkan terus untuk mengatur kehidupan semakin baik, misalnya dengan konsep tria politika, tetapi kalau masih tetap terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang dikategorikan lemah, maka masyarakat di dunia tidak akan mencapai suasana adil dan damai.

Perkembangan pengertian politik didasari cara pandang biner patriarchst, akhirnya menciptakan pengertian politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pengertian politik (klasik) yang semula sebagai suatu musyawarah warga negara untuk membicarakan dan menyelenggarakan segala aspek kehidupan, telah berubah. Ia telah menjadi ilmu yang mempelajari hakikat kedudukan dan menggunakan kekuasaan, dimanapun kekuasaan itu. Pengertian politik adalah kekuasaan yang sekarang berkembang dan makin menyingkirkan perempuan. Pengertian politik ini menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak boleh berkuasa.

#### **b. Politik Perspektif Perempuan**

Beberapa kaum perempuan Indonesia yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, seolah hendak mengulang adegan di depan gedung pemerintah Perancis. Yakni ketika proses reformasi tengah berjalan, dan di gedung parlemen tengah dilakukan negosiasi-negosiasi, pada tahun 1998 bahwa para kaum ibu itu menuntut penurunan harga susu. Tetapi demonstrasi itu tidak dilakukan di depa



gedung pemerintah atau parlemen, melainkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Perempuan seyogianya berteriak ketika negara mengontrol tubuhnya melalui politik KB. Suami-istri seharusnya protes ketika negara mengontrol kehidupan berkeluarga dan menyebarkan slogan “dua anak saja cukup”.

Perempuan yang menjelang menikah dan untuk mendapatkan akte perkawinannya, sepantasnya protes harus bersia disuntik anti-tetanus tanpa diperiksa terlebih dahulu.

Sejarah menunjukkan bahwa setelah berabad-abad perempuan tertindas dan terampas hak politiknya, akhirnya muncul kesadaran baru dari mereka.

Kesadaran yang diikuti gerakan protes ini maka terjadi perubahan baru bagi kaum perempuan. Disinilah paham feminisme muncul dari kesadaran diskriminasi atas perempuan.

Perkembangan feminisme tidak dapat dibendung lagi, dan semuanya mengajak siapa saja yang peduli terhadap gejala macam diskriminasi untuk menyatukan perjuangan feminisme. Oleh karena itu, perjuangan politik bagi perempuan sudah tidak dapat ditunda lagi. Ketakutan perempuan terhadap kehidupan berpolitik perlu disingkirkan bersama. Pemahaman tentang arti politik perlu diluruskan bersama, karena pengertian politik sudah mengalami distorsi.

Politik berperspektif perempuan, berarti pandangan perempuan diakui dan dihargai, hak perempuan mengatur kehidupan dikembalikan. Kaum

perempuan sendiri menyadari tugas pokoknya, pembawa dan pemelihara kehidupan. Tugas yang bermuatan kekuasaan mutlak ini membutuhkan kesadaran kaum perempuan secara mendalam.

Dengan kesadaran ini, kaum perempuan dapat mengendalikannya supaya tidak dikendalikan laki-laki. Laki-laki dan perempuan kembali bersama-sama menyatukan pandangan mereka yang berbeda untuk melakukan kegiatan politik, yaitu mengatur segala aspek kehidupan, tanpa membuat dikotomi kuat-lemah, produksi-reproduksi, dan banyak pasangan dikotomis lainnya yang diletakkan berposisi ordinar-subordinat.

Namun tentu perjuangan untuk mencapai perubahan itu, mestilah dilakukan tanpa kekerasan. Dinamika dan metode dari politik aktif tanpa kekerasan adalah ukuran penting, apakah feminisme berjalan secara konsisten, atau sama saja dalam menjalankan pandangan politik maskulinisme. Politik antikekerasan diperlukan, karena sistem politik ini memperhitungkan nilai alamiah (nature) untuk mengubah pandangan culture (nurture) mengontrol nature.

Untuk berpolitik perspektif perempuan, perlu menggali sumber-sumber kekuasaan. Tidak ada yang tidak bisa berubah di dunia ini. Kecenderungan manusia untuk tunduk pada norma tertentu adalah konstruksi sosial, bukan kodrat maka ia dapat diubah oleh kemauan.

### c. Perempuan dan Politik

Membicarakan soal perempuan, tidak dapat lepas dengan peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan soal politik. Perempuan dalam melaksanakan kegiatannya di masyarakat, ditentukan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern dapat berwujud kemauan dan kualitas pribadi dalam melaksanakan kehendak. Faktor ekstern dapat berupa aturan permainan yang telah ditentukan, baik secara hukum tertulis maupun tidak.

Perempuan hidup dalam masyarakat yang saling mengadakan interaksi. Arah dan dasar interaksi ini adalah nilai-nilai bersama, norma-norma atau standar tingkah laku yang mengatur interaksi individu, dan sanksi terhadap pelanggaran norma yang telah ditetapkan bersama. Semuanya itu saling kait mengait, dasar dan arah umum interaksi inilah yang dikenal sebagai kultur.

Interaksi tersebut terjadi pada berbagai bidang yang mempunyai tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya kebutuhan ekonomi, kebutuhan bermasyarakat, kebutuhan rohani dan sebagainya. Setiap kebutuhan memerlukan interaksi dan mekanisme tertentu yang gerakannya diatur oleh suatu lembaga atau institusi. Institusi-institusi itu saling berhubungan dan merupakan suatu bentuk yang disebut struktur sosial. Dalam struktur sosial itulah manusia dibentuk, diatur, direkayasa, seperti aturan yang telah dibuat bersama, baik secara sukarela maupun terpaksa.

Perempuan dalam struktur sosial berada dalam rekayasa ideologi gender. Pada sisi itu, keberadaan perempuan tidak diuntungkan karena sudut pandang dan perlakuan yang tidak adil. Sebenarnya, selama situasi hasil rekayasa manusia itu, melalui kebudayaan, membuat masyarakat sejahtera, tidak menjadi soal. Namun yang menjadi persoalan, justru rekayasa peradaban manusia itu membuat mereka saling bermusuhan, saling menindas dan tidak aman, tidak adil dan tidak sejahtera.

Situasi ini perlu dicermati, khususnya yang berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang bagi perempuan dalam masyarakat Mandailing. Perempuan dalam berinteraksi di bidang sosial kemasyarakatan diatur oleh lembaga politik. Kekuatan politik telah membuat rekayasa tentang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab perempuan dalam hidup bermasyarakat, juga tidak akan terlepas dari aturan institusi politik.

Sampai saat ini, masih banyak perempuan Mandailing di Pemko Medan yang sudah puas dengan peranannya, tanpa mempersoalkan kedudukannya. Oleh karena itu, masih banyak perempuan yang phobi terhadap kehidupan politik.

Kelompok ini beranggapan bahwa bidang politik bukan bidang kaum perempuan karena keras dan kuasa.

Pendapat itu pasti tidak melihat bahwa dunia politik juga membutuhkan sentuhan-sentuhan feminim. Mengingat bidang politik sangat dominan dalam menentukan kehidupan, pada hal perempuanlah yang mempunyai hak dan

wewenang memelihara hidup (kodrat alam), maka sudah seharusnya perempuan diberi dan harus ambil bagian bermain dalam bidang politik. Di sana, perempuan dapat memainkan posisinya sebagai pribadi manusia yang mandiri dan menulatkan sikap feminimnya.

**d. Pluralisme dan Demokratisasi**

Penting untuk diketahui bersama bahwa terbentuknya masyarakat terjadi karena hasil rekayasa sekelompok manusia yang mendapat kekuasaan. Untuk melaksanakan kehidupan bersama, sejak zaman purba, manusia menciptakan pranata-pranata untuk dapat berelasi dengan alam, lingkungan (sosial) manusia, dan bahkan relasi dengan Sang Pencipta.

Sangat wajar apabila pranata yang mereka buat, erat kaitannya dengan keadaan biologis dan lingkungan hidup manusia. Termasuk dalam pranata yang mereka buat untuk mengatur pembagian kerjapun, disesuaikan dengan keadaan itu. Perempuan Mandailing tinggal di rumah, mengurus makanan dan anak-anak, laki-laki keluar rumah untuk berburu binatang.

Pada zaman itu, terjadilah kebiasaan manusia bertingkah laku sesuai pranata yang dibuat bersama. Perempuan bercocok tanam, kaum laki-laki berburu. oleh karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak, maka dapat dipastikan bahwa di belakang pranata itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan yang mereka sepakati bersama, demi kepentingan bersama pula.

Perilaku serta adat istiadat untuk memelihara kehidupan tersebut, diturunkan melalui tradisi. Namun rupanya dalam penerusan tradisi, nilai-nilai yang ada di balik tradisi tidak dijelaskan, sehingga tradisi dalam berbagai aspek kehidupan yang menjalin relasi antarpribadi dan antarkelompok manusia itu berjalan begitu saja.

Dalam proses perkembangan zaman, kemudian pranata itu menjadi sistem dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik (kekuasaan), keamanan dan kepercayaan (agama). Usaha manusia membuat pranata terus menerus, selanjutnya dipahami sebagai kebudayaan. Perkembangan zaman membuat kehidupan bermasyarakat semakin kompleks.

Aspek-aspek kehidupan makin saling mempengaruhi perkembangan manusia secara pribadi dan kelompok tidak homogen lagi. Oleh karena itu, terjadilah struktur sosial tertentu